

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Ivan dan Nurul (2015)

Penelitian dari Ivan dan Nurul ini mengenai “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara (Studi Kasus pada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Variabel independen dari penelitian ini adalah pelatihan, pengalaman, *gender*, umur, dan latar belakang pendidikan, sedangkan kualitas hasil pemeriksaan sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *gender*, umur dan latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan keuangan negara. Variabel pengalaman dan pelatihan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan keuangan negara.

Persamaan penelitian Ivan dan Nurul dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan pengalaman auditor dan latar belakang pendidikan sebagai variabel independen dan kualitas hasil pemeriksaan sebagai variabel dependen. Sampel dan populasi yang digunakan merupakan ruang lingkup auditor BPK RI yang merupakan entitas pemerintah. Akan tetapi penelitian sekarang menggunakan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

2.1.2 Laksandi Eko dan Aulia Fuad (2015)

Penelitian ini mengenai “Pengaruh Persepsi Auditor Pemerintah atas Independensi, Integritas, dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Hasil

Pemeriksaan”. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh independensi, integritas, dan profesionalisme auditor terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil penelitian ini yaitu independensi, integritas dan profesionalisme auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Persamaan penelitian Laksandi Eko dan Aulia Fuad dengan penelitian sekarang adalah menggunakan variabel independensi auditor sebagai variabel independen dan kualitas hasil pemeriksaan sebagai variabel dependen. Sampel dan populasi yang digunakan merupakan ruang lingkup auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang merupakan entitas pemerintah.

2.1.3 Annisa Parasayu dan Abdul Rohman (2014)

Judul penelitian ini “Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit Internal (Studi Persepsi Aparat Intern Pemerintah Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali) meneliti tentang pengaruh independensi, obyektifitas, pengetahuan, pengalaman kerja, integritas, dan etika audit terhadap kualitas hasil audit internal di aparat intern pemerintah kota Surakarta dan kabupaten Boyolali. Hasil penelitian ini yaitu independensi, pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit intern. Sedangkan obyektifitas, pengalaman kerja, integritas, dan etika audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit intern.

Persamaan dengan penelitian saat ini adalah menggunakan variabel yang sama yaitu independensi dan pengalaman sebagai variabel independen dan kualitas hasil audit sebagai variabel dependen. Perbedaannya adalah penelitian Annisa menambahkan obyektifitas, pengetahuan, integritas, dan etika audit sebagai

variabel independen. Sampel yang digunakan adalah Aparat Intern Pemerintah Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali.

2.1.4 Lauw, et. al (2012)

Judul penelitian ini “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit” meneliti tentang pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit di wilayah Jakarta Pusat. Hasil penelitian ini yaitu kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, independensi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Persamaan penelitian Lauw, et. al dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti menggunakan variabel kompetensi dan independensi auditor sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Perbedaanya penelitian Lauw, et. al menggunakan sampel seluruh auditor KAP yang berada di wilayah Jakarta Pusat, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel auditor yang berada di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

2.1.5 Aulia Agustin (2011)

Aulia Agustin melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pengalaman, Independensi dan *Due Profesional care* Auditor terhadap Kualitas Hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau)”. Variabel independen yang digunakan adalah pengalaman auditor, independensi dan *due profesional care*, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas audit. Hasil dari penelitian ini adalah variabel pengalaman auditor, independensi dan *due profesional care* berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.

Persamaan kedua penelitian ini terdapat di variabel independen dan dependen, sama-sama menggunakan variabel pengalaman, independensi auditor, dan kualitas audit. Perbedaan kedua penelitian ini terdapat di sampel dan populasi, penelitian saat ini menggunakan auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, sedangkan penelitian Aulia Agustin berada di Provinsi Riau.

2.1.6 Singgih dan Bawono (2010)

Penelitian ini menggunakan judul “Pengaruh Independensi, Pengalaman, *Due Professional Care* dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor di KAP “Big Four” di Indonesia)” meneliti tentang Independensi, Pengalaman, *Due Professional Care* dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit di KAP “Big Four” di Indonesia. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa independensi, pengalaman, *due professional care* dan akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti menggunakan independensi dan pengalaman audit sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Perbedaan kedua penelitian ini adalah sampel dan populasi peneliti terdahulu di KAP “Big Four” di Indonesia sedangkan penelitian sekarang pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Agency Theory

Agency Theory atau teori keagenan menjelaskan tentang hubungan antara agen dengan prinsipal. Dalam teori ini masing-masing pihak baik prinsipal maupun agen bertindak untuk kepentingannya sendiri. Agen akan berupaya untuk meningkatkan imbalan yang diterima baik dalam bentuk gaji, bonus atau bahkan investasinya dalam perusahaan.

Pada dasarnya, prinsipal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen yang terkait dengan dananya dalam perusahaan. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban manajemen tersebut prinsipal menilai kinerja manajemen, tetapi yang seringkali terjadi adalah kecenderungan manajemen untuk melakukan tindakan yang melanggar standar audit yaitu dengan membuat laporannya terlihat baik, sehingga kinerjanya dianggap baik. Berdasarkan hal tersebut prinsipal melakukan pengujian yang dilakukan oleh pihak independen yaitu auditor independen untuk mengurangi atau meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen saat membuat keuangan.

Abdullah dan Asmara (2006) menjelaskan bahwa dalam hubungan keagenan antara legislator sebagai prinsipal dan eksekutif sebagai agen, Eksekutif sebagai pihak yang memiliki akses informasi lebih banyak akan bersikap oportunis dengan memaksimumkan anggarannya, sedangkan legislator sebagai prinsipal yang memiliki kepentingan untuk mengusulkan program-program yang mendukung kepentingan dari konstituenya tidak memiliki informasi yang cukup apakah program-program tersebut telah benar dilaksanakan oleh eksekutif. Dengan

asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong eksekutif (agent) untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui legislator (principal). Dalam kondisi yang asimetri tersebut, eksekutif dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Beberapa kasus yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri yang telah melibatkan auditor, dimana auditor sebagai pihak independen telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan adanya bentuk manipulasi hasil audit serta adanya kebocoran dana.

Teori agensi menjelaskan bahwa terdapat konflik pada pemilik dan agen dalam tujuan yang berbeda pada masing-masing pihak dimana pemilik menginginkan laporan keuangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penentuan keputusan, tetapi pihak agen akan selalu berusaha untuk membuat laporan keuangan terlihat baik agar kinerja dari agen dapat dinilai baik oleh pemilik. Dibutuhkan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik tersebut, yakni auditor independen yang mempunyai tingkat independensi yang tinggi agar menjadi pemecah solusi dalam konflik. Berdasarkan teori agensi tersebut BPK berdiri sebagai pihak ketiga yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan konflik tersebut. Rakyat sebagai pihak utama yang diwakilkan oleh DPR yang akan mempercayakan tugas audit pada pihak Badan BPK untuk memeriksa laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. BPK juga melakukan mekanisme pengawasan dan pemeriksaan dan sesuai dengan Undang-undang nomor 15 tahun

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 2 ayat 2, maka konflik tersebut akan teratasi.

2.2.2 Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang dikembangkan oleh Fritz Heider. Teori atribusi membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk memahami penyebab perilaku kita dan orang lain. Teori atribusi menjelaskan proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Menurut Fritz Heider (1958) dalam Januar (2013) mengatakan bahwa perilaku seseorang bisa disebabkan karena faktor-faktor internal (atribusi internal) dan dapat pula disebabkan oleh faktor eksternal (atribusi eksternal). Menurut Menezes (2008) dalam Januar (2013) faktor-faktor internal seperti kemampuan, pengetahuan, dan usaha, sedangkan faktor eksternal bisa berupa kesempatan dan juga lingkungan.

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami (Harvita, 2012). Dalam hidupnya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial yang disebut dengan *disponitional attributions* dan *situational attributions* (Luthans, 2005). *Disponitional attributions* atau penyebab internal mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, motivasi. Sedangkan *situational attributions* atau penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Setiap tindakan yang akan dilakukan seseorang akan

dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal individu tersebut. Perilaku yang disebabkan oleh hal-hal bersifat internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi dari diri individu yang bersangkutan. Sedangkan perilaku yang dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat eksternal dilihat sebagai hasil dari tekanan situasi atau keadaan tertentu yang memaksa seseorang melakukan perbuatan tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena peneliti ingin mengetahui faktor-faktor perilaku auditor yang dapat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Pengaruh perilaku seseorang inilah yang diyakini dapat membuat auditor berlaku independen atau kompetensi atau sebaliknya.

2.2.3 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai berikut (<http://www.bpk.go.id>) :

1. Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP)

Jabatan fungsional pemeriksa adalah jabatan yang mempunyai lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BPK. Pembinaan JFP merupakan kewenangan BPK yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Sekretaris Jendral BPK. Dalam melaksanakan pembinaan Sekretaris Jendral BPK mempunyai tugas antara lain:

- a. menetapkan pedoman pelaksanaan dan teknis yang dibutuhkan;
- b. menetapkan kebijakan atau pembinaan diklat fungsional;
- c. menetapkan pedoman formasi jabatan dan peran;
- d. menetapkan standar kompetensi pemeriksa;
- e. menyelenggarakan sertifikasi peran;
- f. melakukan pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali ke dalam JFP, serta pembebasan sementara dan pemberhentian dari JFP;
- g. memfasilitasi pelaksanaan JFP serta pengusulan tunjangan dan batas usia pensiun JFP; dan
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas JFP.

Jenjang JFP di lingkungan BPK dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksa Pertama;
- b. Pemeriksa Muda;
- c. Pemeriksa Madya; dan
- d. Pemeriksa Utama.

2. Pemeriksa

Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Peran pemeriksa adalah peran yang dimiliki oleh PNS di lingkungan BPK yang menduduki JFP setelah memenuhi persyaratan tertentu. Pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan satuan kerja bersangkutan sesuai dengan ketentuan organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK. Tugas pokok pemeriksa adalah melaksanakan kegiatan pemeriksaan yang meliputi penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, evaluasi pemeriksaan, dan pemantauan kerugian negara atau daerah. Adapun peran-peran pemeriksa adalah sebagai berikut:

- a. Pengendali Mutu adalah peran yang dimiliki oleh Pemeriksa BPK dengan tanggung jawab terhadap mutu hasil pemeriksaan dan disandang oleh Pemeriksa Madya;
- b. Pengendali Teknis adalah peran yang dimiliki oleh Pemeriksa BPK dengan tanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan pemeriksaan dan disandang oleh Pemeriksa Muda atau Pemeriksa Madya;
- c. Ketua Tim Senior adalah peran yang dimiliki oleh Pemeriksa BPK dengan tanggung jawab memimpin pelaksanaan tugas pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi serta disandang oleh Pemeriksa Muda atau Pemeriksa Madya;

- d. Ketua Tim Yuniior adalah peran yang dimiliki oleh Pemeriksa BPK dengan tanggung jawab memimpin pelaksanaan tugas pemeriksaan dengan kompleksitas rendah dan disandang oleh Pemeriksa Pertama atau Pemeriksa Muda;
- e. Anggota Tim Senior adalah peran yang dimiliki oleh Pemeriksa BPK dengan tanggung jawab melaksanakan pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi dan disandang oleh Pemeriksa Pertama atau Pemeriksa Muda;
- f. Anggota Tim Yuniior adalah peran yang dimiliki oleh Pemeriksa BPK dengan tanggung jawab melaksanakan pemeriksaan dengan kompleksitas rendah dan disandang oleh Pemeriksa Pertama;
- g. Tim Penilai Pemeriksa adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pemeriksa.

2.2.4 Kualitas Hasil Pemeriksaan

Teori agensi yang mengasumsikan bahwa kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai media mediator pada hubungan antara prinsipal dan agen sangat diperlukan. Kualitas audit seperti yang dikatakan oleh De Angelo (1981) dalam Januar (2013), yaitu sebagai profitabilitas nilai-nilai-pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan *auditor* akan menemukan dan melaporkan kekeliruan tersebut. Sedangkan Christiawan (2005) mengungkapkan, kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu independensi dan kompetensi. Dari definisi di atas, maka kesimpulannya adalah auditor yang kompeten adalah auditor

yang mampu menemukan adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang mau mengungkapkan pelanggaran tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang *auditor* harus berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kualitas hasil pemeriksaan menunjukkan mutu dari hasil pemeriksaan. Masyarakat memiliki perkiraan bahwa hasil pemeriksaan BPK harus sebanyak mungkin menemukan temuan kesalahan dan kecurangan yang dilakukan *auditee*, karena semakin banyak temuan maka semakin berkualitas hasil pemeriksaanya.

2.2.5 Independensi Auditor

Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau tidak dapat diduga memihak sehingga tidak merugikan pihak manapun. Menurut Wilopo (2014;201) sikap independen terhadap lembaga yang diperiksa serta terhadap kelompok-kelompok luar yang berkepentingan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh para akuntan pemerintah, para akuntan pemerintah harus berperilaku yang akan meningkatkan serta tidak menurunkan sikap independennya.

Dalam pernyataan standar umum kedua dalam SPKN adalah: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. Dengan pernyataan standar umum ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil

pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. Pemeriksa perlu mempertimbangkan tiga macam gangguan terhadap independensi, yaitu gangguan pribadi, ekstern, dan atau organisasi. Apabila satu atau lebih dari gangguan independensi tersebut mempengaruhi kemampuan pemeriksa secara individu dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya, maka pemeriksa harus menolak penugasan pemeriksaan. Dalam keadaan jika pemeriksa tidak dapat menolak penugasan pemeriksaan karena suatu hal, gangguan tersebut harus dimuat dalam bagian lingkup pada laporan hasil pemeriksaan.

Menurut Messier *et. al* (2005), independensi merupakan suatu istilah yang sering digunakan oleh profesi auditor. Independensi auditor merupakan salah satu faktor penting untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Karena jika auditor kehilangan independensinya, maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Supriyono, 1988) dalam (Annisa, 2014). Indikator yang digunakan untuk mengukur independensi ini diadopsi dari penelitian Harhinto (2004) dengan beberapa modifikasi berdasarkan SPKN.

2.2.6 Kompetensi Auditor

Mulyadi (2002) mendefinisikan independensi sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Kompetensi dalam pengauditan merupakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan sesakma. Auditor juga harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu (Arens dkk., 2008:5). Menurut Sukriah (2009) kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan auditor untuk melaksanakan audit dengan benar, yang diukur dengan indikator mutu personal, pengetahuan umum dan keahlian khusus.

2.2.7 Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan merupakan pendidikan terakhir yang ditempuh oleh auditor sebelum mnejalankan tugasnya. Konsep dan dasar-dasar dalam melakukan audit diperoleh dari seseorang melalui pendidikan yang ditempuhnya. Batubara (2008) dan Setraningrum (2012) mengatakan bahwa kualitas pemeriksaan dituntut untuk lebih tinggi dari pada pelaksana, sehingga pemeriksa dapat melakukan penilaian atas ketaatan pelaksana terhadap standar yang berlaku, dan hal itu dapat tercapai jika auditor memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang yang diperiksa.

2.2.8 Pengalaman Auditor

Dalam pekerjaan profesional auditing, pendidikan formal saja tidak cukup untuk menghasilkan auditor yang profesional dan berkualitas tinggi. Dibutuhkan adanya pengalaman kerja dalam mendukung kesuksesan sebagai auditor merupakan nilai tambah bagi auditor dan dapat mendukung terciptanya kualitas

audit yang diharapkan. Pengalaman kerja bagi auditor dapat berupa pengalaman dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani (Suraida, 2005). Auditor yang semakin berpengalaman cenderung mempunyai keunggulan dan kreatifitas dalam mendeteksi, memahami dan mencari sebab dari suatu kesalahan/manipulasi oleh *auditee*.

Menurut Idris Saputra (2002) pengalaman kerja membuat seseorang dapat meningkatkan pengetahuan teknis maupun ketrampilan kerja dengan mengamati orang lain, menirukan dan melakukan sendiri tugas-tugas pekerjaan yang ditekuni. Sedangkan Harhinto (2004) menghasilkan temuan bahwa pengalaman auditor berhubungan positif dengan kualitas audit. Dan Widhi (2006) memperkuat penelitian tersebut dengan sampel yang berbeda menghasilkan temuan bahwa semakin berpengalamannya auditor maka semakin tinggi tingkat kesuksesan dalam melaksanakan audit. Variabel pengalaman menurut Aji (2009) diukur menggunakan indikator lamanya bekerja, frekuensi pekerjaan pemeriksaan yang telah dilakukan.

2.2.9 Hubungan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Independensi merupakan suatu keadaan dimana auditor dalam melaksanakan tugasnya agar tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepada pihak manapun. Arens (2008:45), menjelaskan sikap mental independen dalam penampilan. Audit atas laporan keuangan harus dilakukan oleh seorang auditor yang memiliki independensi yang tinggi. Independensi yang dimiliki auditor akan

menghasilkan kualitas yang baik atas audit yang dilakukannya serta akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, jadi semakin independen seorang auditor maka kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan auditor akan semakin baik.

2.2.10 Hubungan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Dalam melaksanakan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus dibidangnya. Dalam Mabruki dan Winarna (2010) menyatakan bahwa dalam mendeteksi sebuah kesalahan, seorang auditor harus didukung dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi. Alim *dkk.* (2007) menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. Kualitas hasil pemeriksaan semakin baik jika auditor memiliki kompetensi yang baik juga.

2.2.11 Hubungan Latar Belakang Pendidikan Auditor Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Setraningrum (2012) mengatakan bahwa kualitas pemeriksaan dituntut untuk lebih tinggi dari pada pelaksana, sehingga pemeriksa dapat melakukan penilaian atas ketaatan pelaksana terhadap standar yang berlaku, dan hal itu dapat tercapai jika auditor memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang yang diperiksa. Auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan prosedur audit yang benar, memahami dan menggunakan metode penyampelan yang benar. Pengetahuan yang dimiliki auditor

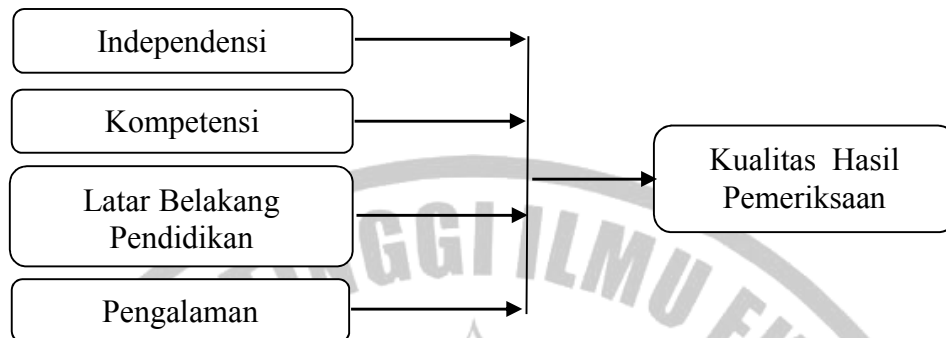
dari latar belakang pendidikan akan sangat mempengaruhi kemampuannya dalam melakukan audit dan kualitas dari laporan audit yang dihasilkan.

2.2.12 Hubungan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Pengalaman auditor akan semakin meningkat seiring dengan semakin lamanya audit yang pernah dilakukan serta kompleksitas transaksi keuangan perusahaan yang diaudit sehingga akan memperluas dan menambah pengetahuannya di bidang akuntansi dan auditing (Christiawan, 2002). Beberapa penelitian menemukan fakta bahwa pengalaman yang diperoleh auditor dari lamanya bekerja sebagai auditor, pengalaman yang diperoleh dari banyaknya tugas pemeriksaan yang dilakukan berpengaruh positif terhadap peningkatan keahlian auditor dalam bidang auditing. Butt (1988) dalam Ivan dan Nurul (2015) membandingkan antara auditor yang berpengalaman dengan auditor yang belum berpengalaman terutama dalam menilai kesalahan dalam laporan keuangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor yang berpengalaman memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menemukan kesalahan dalam laporan keuangan dibandingkan dengan auditor yang belum berpengalaman.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : data diolah

2.4 Hipotesis

Atas dasar landasan teori dan model penelitian tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H1 : Independensi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

H2 : Kompetensi Auditor berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

H3 : Latar Belakang Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

H4 : Pengalaman berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan